

PENERAPAN DAN PENGAMALAN

PANCASILA



DISUSUN OLEH :

11.12.6030 ALIM BAWANDA TEROJA

KELOMPOK I

S1 SISTEM INFORMASI

DOSEN : MOHAMMAD IDRIS.P,DRS,MM

STMIK AMIKOM YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pancasila merupakan dasar dan ideologi bangsa Indonesia yang melandasi terciptanya hukum dan jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka.

Sewajarnya kita sebagai rakyat Indonesia selalu menjunjung tinggi pancasila sebagai dasar bangsa Indonesia, namun jangan hanya mengerti dan memahami tentang pancasila, melainkan kita sebagai rakyat Indonesia harus menerapkan norma – norma yang ada pada pancasila agar terciptanya suasana nyaman dan damai, serta kita sebagai rakyat Indonesia akan memiliki moral atau perilaku yang baik dan dapat di contoh oleh Negara atau bangsa lain.

Sebelum kita dapat memahami dan menerapkan pancasila dalam kehidupan kita sehari – hari kita harus berpegangan atau berpedoman kepada pancasila dan mengerti makna makna yang terkandung di dalam pancasila tersebut.

Namun, agar dapat memahami dan menerapkan pancasila, dibutuhkan suasana yang menunjang dari berbagai pihak, contohnya saja kebijakan pemerintah dan peraturan perundang – undangan, apartur Negara, kepemimpinan dan pimpinan masyarakat.

Untuk membuka wawasan tentang penerapan pancasila kita akan membahasnya dalam bidang ekonomi, budaya, pendidikan, dan IPTEK.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

sebagai warga Negara yang baik, setia pada negaranya dan menghormati para pahlawannya, kita seharusnya mempelajari, mengamalkan, dan mempertahankan nilai – nilai yang ada pada pancasila.

Pancasila adalah dasar dari semua peraturan yang ada di Negara Indonesia ini dengan kata lain semua hukum dan peraturan yang ada di Indonesia dibuat dengan mengacu atau mengikuti nilai – nilai yang ada pada pancasila.

Mungkin kita semua mengaku sebagai warga Negara Indonesia yang baik, namun apakah semua orang dapat mengerti, menghayati dan menerapkan nilai – nilai pancasila dalam kehidupan kita. Bahkan sebagian orang dapat mengerti dan dapat menjelaskan pancasila dengan rinci, namun dalam kehidupan sehari – harinya tidak ada satu halpun yang menggambarkan perilaku dari pancasila tersebut. Alangkah baiknya jika kita dapat mengerti dan menghayati nilai – nilai pancasila, namun dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari – hari kita.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Pedoman penerapan pancasila
2. Pola penerapan pancasila
3. Penerapan pancasila dalam bidang ekonomi, buday, pendidikan dan penerapan pancasila dalam Iptek(ilmu pengetahuan dan teknologi)

BAB II

PENDEKATAN

A. Pendekatan Historis

Pada dasarnya pancasila dibuat untuk memberikan batasan atau arahan pada warga negar Indonesia agar memiliki budi pekerti yang baik dan saling menghormati antara individu satu dengan individu yang lain.

Sebelum Indonesia merdeka, pancasila sudah menjadi dasar dari sebuah bangsa yang akan merdeka, pancasila inilah yang memberikan pandangan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Namun dalam norma – norma atau aturan yang membatasi rakyatnya untuk selalu menyembah tuhanNYA dan menjadikan agama yang dianut sebagai pedoman hidup, menjaga hak – hak antara individu satu dengan individu yang lainnya, besikap adil dan bijaksana pada semua kalangan. Serta memberikan pandangan bagi bangsa Indonesia untuk menjadi suatu bangsa dan Negara yang besar harus berawal dari kebersatuan dalam semua aspek kehidupan.

Pancasila juga menjadi sangat penting bagi keberadaan dan berdirinya Indonesia untuk menjadi Negara atau bangsa yang merdeka dan menjadi bangsa yang besar. Namun pancasila ini juga harus dibarengi dengan penerapan dalam kehidupan bermasyarakat, karena pancasila ini dibuat agar rakyat Indonesia memiliki prilaku yang baik dan bersosial tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya dalam bidang ekonomi yang penuh dengan persaingan antara individu satu dengan individu lainnya ataupun antar kelompok yang dapat menimbulkan partentangan antara pihak – pihak yang bersitegang, oleh sebab itu pancasila dibuat agar rakyat Indonesia memiliki norma – norma dan batasan – batasan dalam berinteraksi social dalam persaingan yang sehat tanpa ada kekerasan dan saling melecehkan antar pihak yang bersaing.

B. Pendekatan Sosiologis

sebagai dasar atau tonggak hukum yang ada di Indonesia, Pancasila juga sangat menekankan pada hubungan yang baik antar manusia ataupun antar kelompok, agar terciptanya suasana yang nyaman dan damai.

Namun pada masa sekarang suasana nyaman dan damai tersebut susah untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat ataupun dalam kelompok.

Hal ini dikarenakan individu ataupun kelompok memiliki pendapat ataupun pandangan yang berbeda – beda terhadap suatu masalah yang dihadapi, namun penyelesaian masalah tersebut disikapi ataupun diselesaikan dengan cara yang salah, sehingga secara otomatis akan menimbulkan kontroversi atau perdebatan yang semakin meluas.

Hal ini akan sangat berbeda jika suatu individu ataupun kelompok dapat memberikan pendapat – pendapat yang membangun, serta disikapi dengan benar, dan diambil keputusan yang seadil – adilnya, sehingga semua pihak merasa puas.

Jadi dalam hal ini perlu hubungan atau interaksi yang baik dari semua pihak agar tercapainya kenyamanan untuk mengutarakan pendapat ataupun mengambil keputusan dalam suatu permasalahan yang mengharuskan kita untuk meminta pendapat orang lain, salah satu contohnya dalam rapat.

C. Pendekatan Yuridis

Pada perumusan konsep dasar Negara dan Undang – Undang Dasar Negara yang diliputi beberapa perbedaan pandangan mendasar diantara para perumus Undang – Undang tersebut, akhirnya diperoleh kesepakatan yang merupakan hasil puncak yang gemilang sebagai perjajian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan Negara Indonesia ini yaitu menetapkan Pancasila sebagai dasar bagi Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat.

Dengan ditemukannya Pancasila sebagai dasar Negara dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 maka Pancasila mempunyai kedudukan sebagai pokok kaidah Negara yang fundamental bagi Negara Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan faktor utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Disamping faktor utama Pancasila didalam sistem ketatanegaraan Indonesia terdapat faktor Undang – Undang Dasar 1945. Oleh karena itu Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 tidak bisa dipisahkan satu sama lain baik dalam teori maupun praktek ketatanegaraan. Disatu pihak Pancasila sebagai sistem

dasar dan merupakan landasan ideal maka dipihak lain UUD 1945 adalah sub system dari pancasila yang merupakan landasan structural dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

Sebagai ideology Negara dan falsafah bangsa, pancasila mencakup kesatuan integral norma – norma fundamental bangsa Indonesia, yakni suatu keyakinan dan pendirian hidup bangsa Indonesia dalam melangsungkan dan mempertahankan eksistensinya terhadap tantangan dunia beserta masalah – masalahnya. Sebagai ideologi Negara, pancasila merupakan sendi dasar dan pedoman bangsa Indonesia dalam bernegara dan bermasyarakat dan sebagai falsafah merupakan kristalisasi nilai – nilai yang tumbuh dari pribadi bangsa Indonesia sebagai kumpulan manusia yang menyatukan diri. Ia dengan demikian adalah pencerminan realitas bangsa Indonesia.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pedoman Penerapan Pancasila

Pedoman dalam penghayatan dan penerapan pancasila dituangkan dalam ketetapan No.II/MPR/1978. Penjabaran ketetapan MPR itu adalah (Noor Ms. Bakry: 1994, 183-185):

1. Sila ketuhanan Yang Maha Esa

- 1) Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agamanya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 2) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Mengembangkan saling hormat menghormati kemerdekaan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- 4) Menghargai setiap bentuk ajaran agama, dan tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab

- 1) Mengakui dan memperlakukan manusia dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Memandang persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia tanpa membedakan suku, turunan dan kedudukan sosial.
- 3) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tepa selira dan tidak semena-mena terhadap orang lain.
- 4) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan berani membela kebenaran dan keadilan.
- 5) Merasa sebagai bagian dari seluruh umat manusia dan karena itu berkewajiban mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain.

3. Sila persatuan indonesia

- 1) Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- 2) Cinta tanah air dan bangsa Indonesia, sehingga sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa, apabila diperlukan.
- 3) Bangga sebagai bangsa Indonesia ber-Tanah air Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dunia.
- 4) Mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika dalam memajukan pergaulan hidup bersama.

4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

- 1) Sebagai warga negara dan warga-masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam.
- 2) Keputusan yang menyangkut kepentingan bersama terlebih dahulu diadakan musyawarah, dan keputusan musyawarah diusahakan secara mufakat, diliputi oleh semangat kekeluargaan.
- 3) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah dan melaksanakannya dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab.
- 4) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur, dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, serta tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
- 5) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

5. Sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

- 1) Menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
- 2) Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- 3) Bersikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.
- 4) Memupuk sikap suka memberi pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan agar dapat berdiri sendiri, tidak menggunakan hak milik

untuk pemerasan, pemborosan, bergaya hidup mewah dan perbuatan lain yang bertentangan dan merugikan kepentingan umum.

- 5) Memupuk sikap suka bekerja keras dan menghargai karya orang lain yang bermanfaat, serta bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan kesejahteraan bersama.

B. Pola Penerapan Pancasila

Pola penerapan pancasila dilakukan agar Pancasila sungguh-sungguh dihayati dan diamalkan oleh segenap warga negara, baik dalam kehidupan orang seorang maupun dalam kehidupan kemasyarakatan. Oleh sebab itu, diharapkan lebih terarah usaha-usaha pembinaan manusia Indonesia agar menjadi insan Pancasila dan pembangunan bangsa untuk mewujudkan masyarakat Pancasila.

1. Jalur-jalur yang digunakan

1) Jalur pendidikan

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam penerapan Pancasila, baik pendidikan formal (sekolah-sekolah) maupun pendidikan nonformal (di keluarga dan lingkungan masyarakat), keduanya sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia.

Dalam pendidikan formal semua tindak-perbuatannya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Dalam pendidikan keluarga penerapan Pancasila harus ditanamkan dan dikembangkan sejak anak-anak masih kecil, sehingga proses pendarah-dagingan nilai-nilai Pancasila dengan baik dan menuntut suasana keluarga yang mendukung. Lingkungan masyarakat juga turut menentukan sehingga harus dibina dengan sungguh-sungguh supaya menjadi tempat yang subur bagi pelaksanaan penerapan Pancasila.

Melalui pendidikan inilah anak-anak didik menyerap nilai-nilai moral Pancasila. Penyerapan nilai-nilai moral Pancasila diarahkan berjalan melalui pemahaman dari pemikiran dan dan pengamalan secara pribadi. Sasaran pelaksanaan pedomaan pengamalan Pancasila adalah perorangan, keluarga, masyarakat, baik dilingkungan tempat tinggal masing-masing, maupun di lingkungan tempat bekerja.

2) Jalur media massa

Peranan media massa sangat menjanjikan karena pengaruh media massa dari dahulu sampai sekarang sangat kuat, baik dalam pembentukan karakter yang positif maupun karakter yang negatif, sasaran media massa sangat luas mulai dari anak-anak hingga orang tua. Sosialisasi melalui media massa begitu cepat dan menarik sehingga semua kalangan bisa menikmati baik melalui pers, radio, televisi dan internet. Hal itu membuka peluang besar golongan tertentu menerima sosialisasi yang seharusnya belum saatnya mereka terima dan juga masuknya sosialisasi yang tidak bersifat membangun. Media massa adalah jalur pendidikan dalam arti luas dan peranannya begitu penting sehingga perlu mendapat penonjolan tersendiri sebagai pola pedoman penerapan Pancasila. Sehingga dalam menggunakan media massa tersebut harus dijaga agar tidak merusak mental bangsa dan harus seoptimal mungkin penggunaannya untuk sosialisasi pembentukan kepribadian bangsa yang pancasilais. Jadi, untuk sosialisasi-sosialisasi yang mengancam penanaman pengamalan Pancasila harus disensor.

3) Jalur organisasi sosial politik

Penerapan Pancasila harus diterapkan dalam setiap elemen bangsa dan negara Indonesia. Organisasi sosial politik adalah wadah pemimpin-pemimpin bangsa dalam bidangnya masing-masing sesuai dengan keahliannya, peran dan tanggung jawabnya. Sehingga segala unsur-unsur dalam organisasi sosial politik seperti para pegawai Republik Indonesia penerapan harus mengikuti pedoman Pancasila agar berkepribadian Pancasila karena mereka selain warga negara Indonesia, abdi masyarakat juga sebagai abdi masyarakat, dengan begitu maka segala kendala akan mudah dihadapi dan tujuan serta cita-cita hidup bangsa Indonesia akan terwujud.

2. Penciptaan suasana yang menunjang

1) Kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan

Penjabaran kebijakan pemerintah dan perundang-undangan merupakan salah satu jalur yang dapat memperlancar pelaksanaan

pedoman penerapan pancasila dimana aspek sanksi atau penegakan hukm mendapat penekanan khusus.

2) Aparatur negara

Rakyat hendaklah berpartisipasi aktif di dalam menciptakan suasana dan keadaan yang mendorong pelaksanaan pedoman penerapan Pancasila. Dan aparatur pemerintah sebagai pelaksana dan pengabdian kepentingan rakyat harus memahami dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penerapan Pancasila perlu disediakan dan memfungsikan lembaga-lembaga kenegaraan, khususnya lembaga penegak hukum dalam menjamin hak-hak warga negaranya dan melindungi dari perbuatan-perbuatan tercela.

3) Kepemimpinan dan pemimpin masyarakat

Peranan kepemimpinan dan pemimpin masyarakat, baik pemimpin formal maupun informal sangat penting dalam pelaksanaan pedoman penerapan. Mereka dapat menyampaikan bagaimana pola pelaksanaan pedoman penerapan Pancasila dan menyuruh bawahan atau umatnya untuk mengikuti pola pedoman pelaksanaan Pancasila. begitu Penerapan pancasila akan tetap lestari.

C. Penerapan Pancasila dalam Bidang Ekonomi, Budaya, pendidikan dan Iptek

1. Bidang ekonomi

Ekonomi yang berdasarkan Pancasila tidak dapat dilepaskan dari sifat dasar individu dan sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain untuk memenuhi semua kebutuhannya tetapi manusia juga mempunyai kebutuhan dimana orang lain tidak diharapkan ada atau turut campur. Ekonomi menurut Pancasila adalah berdasarkan asas kebersamaan, kekeluargaan artinya walaupun terjadi persaingan namun tetap dalam kerangka tujuan bersama sehingga tidak terjadi persaingan bebas yang mematikan (Kaelan, 1996: 193). Dengan demikian pelaku ekonomi di Indonesia dalam menjalankan usahanya tidak melakukan persaingan bebas, meskipun sebagian dari mereka akan mendapat keuntungan yang lebih besar dan menjanjikan. Hal ini dilakukan karena pengamalan dalam bidang ekonomi harus berdasarkan kekeluargaan. Jadi interaksi antar pelaku ekonomi sama-sama menguntungkan dan tidak saling menjatuhkan sehingga usaha-usaha kecil dapat berkembang dan mendukung perekonomian Indonesia menjadi kuat.

2. Bidang budaya

Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, adat-istiadat dan lain kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat (Soerjono Soekanto, 2005: 172). Begitu luas cakupan kebudayaan tetapi dalam pengamalan Pancasila kebudayaan bangsa Indonesia adalah budaya ketimuran, yang sangat menjunjung tinggi sopan santun, ramah tamah, kesusilaan dan lain-lain. Budaya Indonesia memang mengalami perkembangan misalnya dalam hal Iptek dan pola hidup, perubahan dan perkembangan ini didapat dari kebudayaan asing yang berhasil masuk dan diterima oleh bangsa Indonesia. Semua kebudayaan asing yang diterima adalah kebudayaan yang masih sejalan dengan Pancasila. Walaupun begitu tidak jarang kebudayaan yang jelas-jelas bertentangan dengan budaya Indonesia dapat berkembang di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa filter Pancasila tidak berperan optimal, itu terjadi karena pengamalan Pancasila tidak sepenuhnya dilakukan oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu harus ada tindakan lanjut agar budaya bangsa Indonesia sesuai dengan Pancasila.

Pembudayaan Pancasila tidak hanya pada kulit luar budaya misalnya hanya pada tingkat propaganda, pengenalan serta pemasyarakatan akan tetapi sampai pada tingkat kemampuan mental kejiwaan manusia yaitu sampai pada tingkat akal, rasa dan kehendak manusia (Kaelan, 1996: 193).

3. Bidang pendidikan

Pendidikan adalah salah satu piranti untuk membentuk kepribadian. Maka dari itu pendidikan yang dilaksanakan harus sesuai diperhatikan. Pendidikan nasional harus dipersatukan atas dasar Pancasila. Menurut Notonegoro (1973), perlu disusun sistem ilmiah berdasarkan Pancasila tentang ajaran, teori, filsafat, praktek, pendidikan nasional, yang menjadi dasar tunggal bagi penyelesaian masalah-masalah pendidikan nasional. Dengan begitu diharapkan tujuan pendidikan nasional dapat terwujud dengan mudah. Tujuan pendidikan nasional adalah menciptakan manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

4. Ilmu pengetahuan dan teknologi

Iptek harus memenuhi etika ilmiah, yang paling berbahaya adalah yang menyangkut hidup mati, orang banyak, masa depan, hak-hak manusia dan lingkungan hidup. Di samping itu Ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila karena Iptek pada dasarnya adalah untuk kesejahteraan umat manusia. Nilai-nilai Pancasila bilamana dirinci dalam etika yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, adalah sebagai berikut (T. Jacob, 1996: 195):

- 1) Hormat terhadap hayat, karena semua makhluk hidup yang ada di alam semesta ini adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa (sila satu).
- 2) Persetujuan suka rela untuk eksperimen dengan penerangan yang cukup dan benar tentang guna akibatnya, karena ilmu pengetahuan dan teknologi adalah demi kemanusiaan (sila II,IV).
- 3) Tanggung jawab sosial ilmu pengetahuan dan teknologi harus lebih penting dari pada mengejar pemecahan persoalan ilmiah namun mengorbankan kemanusiaan (sila II, V).
- 4) Sumber ilmiah sebagai sumber nasional bagi warga negara seluruhnya (sila III). Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi harus mendahulukan kepentingan bangsa dan negara.
- 5) Alokasi pemerataan sumber dan hasilnya (sila III, V).

- 6) Pentingnya individualitas dan kemanusiaan dalam catur darma ilmu pengetahuan, yaitu penelitian, pengajaran, penerapan, dan pengamalannya (sila II, III, V).
- 7) Pelestarian lingkungan dengan memperhitungkan generasi mendatang (sila I, II, V).
- 8) Hak untuk berbeda dan kewajiban untuk bersatu (semua sila).
- 9) Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mengakibatkan terpisahnya jasmani dan rokhani bagi hayat (semua sila).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setiap bangsa atau Negara memiliki dasar kehidupan berbangsa dan bernegara masing – masing, dan bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menjalankan atau menerapkan dasar kehidupan bangsa tersebut.

Bangsa Indonesia mempunyai pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, nilai dan norma yang terkandung di dalamnya merupakan keinginan dari bangsa Indonesia yang harus di amalkan.

Pengamalan Pancasila ini harus di lakukan dalam berbagai bidang kehidupan di negara Indonesia agar Pancasila benar-benar berperan sebagaimana Fungsi dan kedudukannya dan supaya tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia mudah terwujud.

B. Saran

Dewasa ini pengamalan pengamalan Pancasila semakin memudar terlebih lagi di era globalisasi, sehingga mengancam mental dan kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini harus segera ditangani dengan cara meningkatkan penanaman pengamalan Pancasila melalui pendidikan yang seutuhnya, jadi tidak sebatas teori tetapi juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, perlu adanya kesadaran dari setiap warga negara akan pentingnya pengamalan pancasila dan mempertahankannya.

REFERENSI

- Dahlan Thaib. 1994. *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Andriani Purwastuti, dkk. 2002. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: UNY Press.
- Kaelan. 1996. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Ms Bakry, Noor. 1994. *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo